

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN
EFEKTIVITAS KEMANFAATANNYA UNTUK MASYARAKAT SEKITAR
INDUSTRI DI KOTA CILEGON**

Andjar Astuti

*Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
andjarastuti@yahoo.co.id*

Windu Mulyasari

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
windu.nryd@gmail.com*

ABSTRACT

Issues of corporate social responsibility is an issue many researchers. it is because the issue of implementation and benefits of CSR is still widely questioned for the company and for the public. This study aimed to observe CSR issues. Companies that implement CSR still has problems to the external community. This research is expected to develop model solutions to solve problems in the implementation of CSR. CSR research conducted in industrial areas and communities in Cilegon Banten.

Keyword: Corporate social responsibility

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan sebuah perusahaan yang merupakan sebuah bentuk organisasi menjadi arah sasaran seluruh anggota organisasi tersebut agar melakukan tindakan yang memiliki keselarasan dengan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan akumulasi dari tujuan individu anggota organisasi, yang merupakan tujuan organisasi secara murni, maupun tujuan sosial organisasi. Oleh karena itu penjabaran tentang efektivitas organisasi terkait erat dengan pencapaian tujuan organisasi baik tujuan individu, organisasi, maupun tujuan sosial.

Dalam perspektif individu, maka anggota organisasi membawa tujuan pribadi masuk ke dalam organisasi. Hal ini harus dapat dikendalikan oleh organisasi, untuk menyatukan berbagai kepentingan individu ke dalam kepentingan organisasi secara umum. Dalam perspektif sosial, maka organisasi membawa misi ke dalam hubungan antara organisasi dengan lingkungan eksternal. Hubungan sosial ini terkait dengan peran organisasi dalam masyarakat dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika, seperti masalah perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen,

maupun masyarakat sekitar perusahaan.

Pemahaman hubungan organisasi dan lingkungan eksternal dapat dipandang sebagai tanggung jawab sosial organisasi atau yang lebih dikenal dengan *Corporate social responsibility* (CSR). CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional organisasi. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaandalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan pada faktor keuangan saja, melainkan juga harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Perhatian utama bagi perusahaan dalam menjalankan tindakan organisasionalnya adalah tercapainya efektivitas. Efektivitas merupakan konsep yang belum memiliki definisi secara definitif (Campbel et.al, 1977; Hanan & Freeman, 1977). Bahkan berbagai riset yang dilakukan untuk mencari kriteria yang tepat dalam pengukuran efektivitas memberikan banyak perspektif. Namun pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi (Yutchman & Seashore, 1967; Hanan & Freeman, 1977; Quinn & Cameron, 1983; Steers, 1975). Yang salah satunya adalah terlaksananya program CSR, yang mana program CSR ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, jadi bukan

hanya sekedar kesadaran/kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya saja.

Beberapa kalangan beranggapan bahwa CSR merupakan bagian yang terpisahkan dengan sumbangan sosial dan "perbuatan baik" atau kedermawanan perusahaan, namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Beberapa perusahaan seringkali mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan komunitas (masyarakat), seperti: pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada kegiatan komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama *triple bottom line*, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi apakah usaha perusahaan untuk mencapai efektivitas internal organisasi, dapat mempengaruhi juga terhadap efektivitas tujuan publik organisasi, yang berkaitan dengan hubungan sosial organisasi dengan lingkungannya, melalui CSR.

2. Perumusan Masalah

Penelitian difokuskan pada CSR di kawasan industry kota Cilegon. Beberapa Perusahaan yang ada di kawasan ini telah memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar tiap tahunnya. Namun kenyataannya masih sering terjadi

konflik kepentingan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan sampai melakukan tindakan pengamanan internal dikarenakan banyaknya protes dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjembatani gap yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan mengobservasi kondisi riil yang ada atas penerapan CSR. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi CSR perusahaan serta mengobservasi masyarakat sekitar atas penerapan CSR tersebut. Penelitian ini penting dilakukan, karena melihat dari besaran manfaat yang diklaim perusahaan atas keberadaannya tersebut, namun persepsi masyarakat yang masih belum menerima apakah memang dengan berdirinya perusahaan tersebut memberi kemanfaatan kepada mereka. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan, yaitu lebih ditekankan pada penggalan informasi CSR dari perusahaan dan persepsi penerimaan CSR oleh masyarakat. Dasar yang digunakan adalah implementasi CSR "*triple bottom line*", dengan menggunakan standar *The Global Reporting Initiative* (GRI).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori tentang *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility (CSR) seperti yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Jadi CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi/perusahaan.

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan setelah kematian Roosevelt, ketika para penerbit berpengaruh tidak populer di kalangan publik. Publik selalu curiga terhadap press, bahkan ketika para pemimpin industri ini diganti dengan yang baru. Press telah merumuskan "kode etika" selama berdekade (Masyarakat Editor Surat Kabar Amerika (ASNE) menerapkan "aturan jurnalisme" (*The Canons of Journalism*) di tahun 1923) dan televisi menjadi media paling populer pada saat itu.

Pada tahun 1970an, satu dekade setelah diterbitkannya *Four Theories (of the press)*, media mulai menerapkan standar sosial baru, tidak hanya dengan membuka saluran dan halaman-halamannya untuk gagasan-gagasan baru, tapi juga dengan mempekerjakan wanita dan golongan minoritas. Dengan latar belakang baru, para jurnalis baru tersebut menawarkan perspektif baru. Sejak awal abad ke 19 publikasi minoritas berfungsi sebagai suara untuk komunitasnya masing-masing. Dengan bergabungnya mereka ke media, mereka diharapkan bisa membawa agenda minoritas ke media, sehingga bisa menjaga agar masalah-masalah mereka dipertimbangkan oleh para pemimpin masyarakat dan para pembuat keputusan.

Media juga memahami pergerakan pemerintah. Ketika itu pemerintahan telah menerapkan

kontrol atas muatan siaran; kemudian, pemerintahan lokalpun melakukan tawar-menawar dengan organisasi kabel. Hollywood ditekan dengan sensor, salah satunya melalui sistem rating. Pada umumnya, surat kabar dan majalah utama berorientasi pada khalayak. Berita menjadi semakin mudah dimengerti; berita-berita bisnis dan gaya hidup bersaing untuk mendapat ruang dengan berita politik dalam surat-surat kabar dan majalah. Di tahun 1970an, surat kabar mulai menyediakan kolom saran pemirsa dan *hotline*. Surat kabar tidak hanya mengizinkan diterbitkannya beragam surat ke editor dan opini atau kolom-kolom komentar pembaca, tapi juga melaksanakan perbaikan harian untuk memperbaiki kesalahan.

2. CSR Sebagai Bentuk Pencapaian Efektivitas perusahaan(Organisasi) Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Eksternal

Menurut Hendriksen (1994), perusahaan/organisasi harus dapat melihat lingkungan sosialnya, yang terdiri dari masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional perusahaan. Oleh karena itu entitas bisnis harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, hal ini dapat dilakukan melalui informasi secara periodikal sehingga informasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Secara umum, perusahaan memiliki tujuan organisasi untuk publik. Tujuan publik ini merupakan tujuan sosial, yang memiliki perspektif hubungan sosial organisasi dengan lingkungan. Dalam teori tanggung jawab sosial dapat ditarik kesimpulan,

bahwa organisasi pada dasarnya memiliki beban untuk memahami kondisi lingkungan sekitar dan mengatasi dampak yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan organisasi/perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tujuan organisasi harus juga memiliki kaitan dengan hubungan sosial lingkungan. CSR dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus pencapaian efektivitas tujuan sosial perusahaan tersebut.

Gagasan CSR diungkapkan oleh John Elkington melalui konsep "3P" (*profit, people, and planet*) yang dituangkan dalam bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" jika sebuah organisasi ingin *sustain*, maka perlu memperhatikan 3P, yakni, bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) Fox, et al (2002) seperti dikutip Yusuf Wibisono (2007:7), definisi *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial organisasi, adalah komitmen dunia bisnis untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Sedangkan Trinidad and Tobacco Beureau of Standard (TTBS) menyimpulkan bahwa CSR terkait dengan nilai dan

standar yang dilakukan berkenaan dengan beroperasinya sebuah korporat, maka CSR yang diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari para karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002). Sementara Ahyudin (2007) memandang CSR sebagai strategi simbiosis antara organisasi dengan masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan bersama melalui dedikasi dan peran sosial organisasi sehingga tercipta harmonisasi yang saling menguntungkan.

CSR meliputi *sustainability finance* dan *sustainability investment*. *Sustainability finance* : Berkaitan dengan kompetensi inti sektor keuangan agar berkesinambungan dan menggunakan kriteria kesinambungan ketika melakukan investasi, pinjaman dan promosi organisasi yang berhubungan dengan bisnis dalam kriteria kesinambungan yang diterima umum. *Sustainability investment*: Diversifikasi portofolio yang dilakukan dengan melakukan investasi di dalam organisasi sehingga industri secara luas dapat mengaplikasikan konsep kesinambungan (Dow Jones, 2004). Dari konsep *sustainability finance and sustainability investing* nantinya mengarah pada konsep *corporate sustainability*: Suatu pendekatan dalam rangka penciptaan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Konsep keberlanjutan akan mendorong pembangunan ekonomi, lingkungan dan masyarakat melalui pemanfaatan peluang dan resiko pengelolaan.

Pendapat lain mengatakan, CSR sebagai suatu kewajiban organisasi (tidak hanya) perseroan terbatas (PT), untuk memberikan perhatian terhadap pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat serta lingkungan dalam setiap aspek operasinya. Konsep CSR sangat berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip ini mengatakan bahwa setiap pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek keuangan dan deviden (kesejahteraan para pemegang saham), tetapi harus didasarkan juga pada aspek sosial dan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas organisasi.

Bagi organisasi maka semakin disadari bahwa kelangsungan hidup organisasi juga tergantung dari hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungannya tempat organisasi beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa organisasi memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana organisasi menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan organisasi (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai organisasi dan sistem nilai masyarakat, maka organisasi dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup organisasi (Lindblom, 1994, dalam Haniffa et al, 2005). Penelitian Basamalah et al (2005) yang melakukan review atas *sosial and environmental reporting and auditing* dari dua organisasi di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia

dan PT Inti Indorayon, mendukung prediksi *legitimacy theory* tersebut.

3. Pengembangan hipotesis

Organisasi dalam hal ini suatu perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba, dan dalam rangka mencapai tujuannya, maka perusahaan memanfaatkan berbagai sumberdaya di sekelilingnya. Oleh karena itu, perusahaan sangat bergantung pada sumberdaya sekeliling untuk melakukan proses produksi. Di sisi lain, sumberdaya di sekelilingnya juga membutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan individu, artinya, antara perusahaan dan lingkungan saling bergantung.

Namun kemudian terjadi suatu konflik sehingga antara keduanya dapat terjadi masalah. Namun masalah tersebut kadang tidak dapat terpecahkan karena saling ketergantungan yang terjadi. Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka dimunculkan proposisi sebagai berikut:

Penerimaan publik atas keberadaan organisasi lebih didasarkan pada kemanfaatan dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

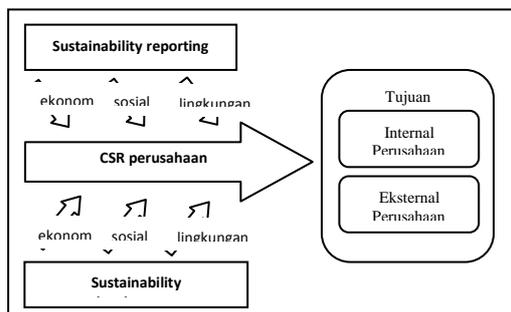
Objek penelitian adalah penerapan *Corporate social responsibility* di perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan model solusi atas permasalahan penerapan CSR perusahaan di wilayah Kota Cilegon Banten. Fokus penelitian adalah observasi studi kasus penerapan CSR di perusahaan didasarkan pada standard GRI.

Standard tersebut mengintegrasikan kemanfaatan sosial dalam *sustainable development* dan *sustainable reporting*, dan melihat penerapan CSR dalam 3 dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam setiap dimensi GRI tersebut terdapat indikator penerapan CSR, yang akan diobservasi dalam penelitian ini. Selain mengobservasi CSR di perusahaan, standard GRI juga memungkinkan untuk dilakukannya observasi penerapan CSR langsung ke masyarakat. Oleh karena itu focus penelitian adalah observasi penerapan CSR di perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Penelitian ini pada dasarnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan tujuan untuk menerapkan model solusi yang sudah dikembangkan. Tahap kedua merupakan tahapan analisis hasil observasi tahun pertama. Hasil observasi penerapan CSR kemudian dianalisis untuk mencari manfaat dan kerugian, serta mencari gap yang menimbulkan konflik yang selama ini terjadi. Hasil dari analisis dapat digunakan untuk kajian baik bagi peneliti, maupun perusahaan, serta masyarakat agar dapat dicari solusi yang terbaik.

Pada laporan penelitian tahun pertama, maka lebih dititik beratkan pada analisa penerapan CSR di perusahaan. Perusahaan X telah bersedia sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini perusahaan dianalogkan sebagai perusahaan X sebagai bentuk kerahasiaan penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus yang terjadi di perusahaan X.

**Bagan alir tujuan penelitian
Penerapan CSR perusahaan untuk
kemanfaatan masyarakat ditinjau
dari ekonomi, sosial dan lingkungan**



Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur terkait penerapan CSR di perusahaan. Penerapan CSR mengacu pada indikator *The Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator tersebut dikembangkan terlebih dahulu menjadi pertanyaan wawancara terstruktur. Pihak perusahaan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah yang memiliki kewenangan dalam penerapan CSR, beberapa karyawan perusahaan sebagai penerima CSR di internal perusahaan.

Keseluruhan hasil wawancara pada akhirnya akan dikumpulkan dan dibuat analisis untuk memahami gap yang terjadi atas penerapan CSR perusahaan dengan persepsi penerimaan masyarakat. Sebagai hasil akhir, maka hasil penelitian dapat didiskusikan untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

Perusahaan X merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di wilayah Cilegon. Dalam penelitian ini, eksplorasi atas penerapan CSR dilakukan pada perusahaan X. Pembahasan akan dilakukan pada

setiap aspek yang membentuk indikator tersebut. Indikator pembentuk GRI terdiri dari:

- 1) Indikator kinerja ekonomi
 - a) Aspek kinerja ekonomi
 - b) Aspek kehadiran pasar
 - c) Aspek dampak ekonomi tidak langsung
- 2) Indikator kinerja lingkungan
 - a) Aspek material
 - b) Aspek energy
 - c) Aspek air
 - d) Aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati)
 - e) Aspek emisi, efluen, dan limbah
 - f) Aspek produk dan jasa
 - g) Aspek kepatuhan
 - h) Aspek pengangkutan/transportasi
 - i) Aspek menyeluruh
- 3) Indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak,
 - a) Aspek pekerjaan
 - b) Aspek tenaga kerja (hubungan manajemen)
 - c) Aspek kesehatan dan keselamatan
 - d) Aspek pendidikan dan pelatihan
 - e) Aspek keberagaman dan kesetaraan
- 4) Indikator hak asasi manusia
 - a) Aspek praktek investasi dan pengadaan
 - b) Aspek nondiskriminasi
 - c) Aspek kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul
 - d) Aspek pekerja anak
 - e) Aspek kerja paksa dan kerja wajib
 - f) Aspek praktek atau tindakan pengamanan
 - g) Aspek hak penduduk asli
- 5) Indikator masyarakat sosial

- a) Aspek komunitas
 - b) Aspek korupsi
 - c) Aspek kebijakan public
 - d) Aspek kelakuan tidak bersaing
 - e) Aspek kepatuhan
- 6) Indikator tanggung jawab produk.
- a) Aspek kesehatan dan keamanan pelanggan
 - b) Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa
 - c) Aspek komunikasi pemasaran
 - d) Aspek keleluasaan pribadi pelanggan
 - e) Aspek kepatuhan

Indikator pertama dalam GRI adalah indikator kinerja ekonomi. Indikator kinerja ekonomi memiliki 3 aspek yaitu aspek kinerja ekonomi, aspek kehadiran pasar dan aspek dampak ekonomi tidak langsung. Dalam aspek kinerja ekonomi, perusahaan X telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. Analisa atas implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi juga dilakukan oleh perusahaan X. Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti juga telah dilakukan oleh perusahaan X sebagai kewajiban perusahaan kepada pegawainya. Perusahaan X secara berkala memperoleh bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah, yang artinya perusahaan memiliki tingkat pertanggungjawaban perusahaan yang baik. Indikator ini sebagai sinyal kepada pihak lain bagaimana

perusahaan X telah melakukan kegiatan ekonominya.

Terkait aspek kehadiran pasar, perusahaan X telah melaksanakan kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan dengan tertata dan terstruktur. Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan dilakukan dengan prosedur jelas dan memiliki panduan jelas. Pada aspek rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi tidak dimiliki oleh perusahaan X. Pada aspek ini perusahaan X telah memiliki standard pengupahan yang jelas sesuai dengan kebijakan yang dimiliki perusahaan pusat, sehingga penggajian dan pengupahan tidak mengikuti standard lokal dimana perusahaan X berdiri.

Terkait aspek dampak ekonomi tidak langsung, perusahaan X telah melakukan beberapa kontribusi dengan melakukan pembangunan sebagai dampak dari investasi infrastruktur perusahaan tersebut serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono. Untuk menjalankan pembangunan tersebut, perusahaan X juga melakukan studi untuk dapat memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampak perusahaan ke masyarakat.

Indikator berikutnya adalah indikator kinerja lingkungan. Indikator ini memiliki beberapa aspek yaitu aspek material, aspek energy, aspek air, aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati), aspek emisi,

efluen, dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek pengangkutan/transportasi, dan aspek menyeluruh. Pada aspek material, perusahaan X menggunakan bahan daur ulang baru 20% dari pemakaian bahan. Penggunaan energy dari sumber daya primer sebesar 80%. Energy lebih banyak berasal dari listrik. Sedang pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer baru sebesar 20%. Untuk pemakaian energy lain belum dilakukan oleh perusahaan X. Pemakaian energy alternative sangat disarankan untuk mengurangi beban energy primer.

Perusahaan X belum dapat mendokumentasikan penggunaan air bagi perusahaan, baik berupa total pengambilan air per sumber, sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air juga persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang. Ada baiknya perusahaan X mempertimbangkan untuk melakukan pemeliharaan air, sehingga penggunaan konsumsi air dan limbah air yang dikonsumsi perusahaan terjaga.

Berkenaan aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati) perusahaan X belum mendokumentasikan apakah lokasi perusahaan berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi. Dalam aspek ini, yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan adalah mendokumentasikan berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang

memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi), perlindungan dan pemulihan habitat, serta strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.

Perusahaan X belum dapat menjelaskan bagaimana dampak dari emisi, efluen, dan limbah dari perusahaannya. Dimensi dari aspek ini yang ditanyakan dalam wawancara, belum terdokumentasi dengan baik oleh perusahaan X. Hal ini juga terjadi pada aspek produk dan jasa yang meliputi adanya inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut serta persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Perusahaan X belum pernah memperoleh denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. Juga belum ada dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.

Indikator berikutnya adalah praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Indikator ini memiliki beberapa aspek yaitu aspek pekerjaan, aspek tenaga kerja (hubungan manajemen), aspek kesehatan dan keselamatan, aspek pendidikan dan pelatihan, dan aspek keberagaman dan kesempatan setara. Perusahaan X sudah memberikan tunjangan pension terkait dengan manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu)

menurut kegiatan pokoknya. Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut oleh perusahaan X mencapai 100%.

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan sudah 100%. Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah dalam perusahaan X tidak ada. Rata-rata program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya dilaksanakan perusahaan X adalah 80 jam per tahun. Perusahaan X juga telah melakukan perjanjian resmi dengan serikat karyawan terkait masalah kesehatan dan keselamatan karyawan.

Rata-rata jam pelatihan, program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier sekitar 80 jam tiap tahunnya. Seluruh karyawan menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Indikator berikutnya terkait dengan hak asasi manusia. Aspek pertama dari indikator ini adalah praktek investasi dan pengadaan. Perusahaan X telah mendokumentasikan berapa

persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia. Demikian juga untuk persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM. Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi baru dilakukan perusahaan X sebesar 10%.

Tidak terdapat kasus diskriminasi yang terjadi di perusahaan X. Aspek kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul. Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Perusahaan X menggunakan personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi yang terlatih secara keseluruhan.

Indikator berikutnya adalah masyarakat sosial. Aspek pertama adalah aspek komunitas dimana perusahaan X telah mendokumentasikan sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri. Pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi baru sekitar 10%.

Dalam aspek kebijakan public, perusahaan X belum ikut dalam kebijakan publik dan partisipasi dalam

proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. Selain itu perusahaan juga belum berkontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.

Indikator terakhir berkaitan dengan tanggung jawab produk. Aspek pertama adalah aspek kesehatan dan keamanan pelanggan. Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut telah dilaksanakan perusahaan X. Belum ada pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

Secara umum aspek pemasangan label bagi produk dan jasa telah dilaksanakan perusahaan X. Label tersebut member jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. Tidak terdapat pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk. Perusahaan X juga telah melakukan praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

Dalam aspek komunikasi pemasaran, maka sudah terdapat program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan,

promosi, dan sponsorship. Belum ada pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.

SIMPULAN

Perusahaan X bergerak pada industry berat berada di wilayah Cilegon Propinsi Banten. Penelitian dilakukan pada perusahaan X untuk melihat bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility di perusahaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan indikator CSR yang dikembangkan oleh The Global Reporting Initiative (GRI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan X belum sepenuhnya melaksanakan poin-poin penerapan CSR dari GRI. Pada indikator kinerja ekonomi, perusahaan X telah sepenuhnya melaksanakan poin-poin penerapan dari GRI. Poin tersebut terkait kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung.

Pada indikator kinerja lingkungan perusahaan X harus lebih banyak mengeksplorasi pengembangan perusahaan untuk memahami dampak lingkungan sekitar. Baru pada beberapa poin perusahaan X melaksanakan poin GRI, sedang yang lain belum sepenuhnya diterapkan. Perusahaan X baru menerapkan pada poin aspek material, aspek energy, dan aspek produk dan jasa. Sedang aspek air, aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati), dan aspek emisi, efluen, serta limbah harus memperoleh perhatian lebih lanjut.

Penanganan praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, perusahaan X telah sepenuhnya member perhatian terhadap karyawan di lingkup perusahaan. Baik terkait pekerjaan, serikat pekerja, keselamatan dan kesehatan juga pentingnya pendidikan dan pelatihan.

Hubungannya dengan hak asasi manusia, perusahaan X tidak mengalami kesulitan. Aturan kerja yang jelas dari awal rekrutmen mempermudah penanganan masalah karyawan. Oleh sebab itu tidak ada permasalahan nondiskriminasi, pekerja anak, juga kerja paksa. Aturan kerja selain jelas dalam aturan perusahaan, juga hubungan manajemen dan karyawan dijumpatani oleh serikat pekerja.

Perusahaan X dalam indikator masyarakat social, belum terlibat banyak dalam penentuan kebijakan publik. Korupsi belum terdeteksi atau belum ada suatu rambu jelas apabila terjadi atau akan terjadi.

Terkait dengan tanggung jawab produk, perusahaan X cukup ketat. Seluruh aspek dalam indicator ini memang telah dijalankan oleh perusahaan X, baik berupa aspek kesehatan dan keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, dan aspek keleluasaan pribadi pelanggan.

Secara umum untuk indicator intern perusahaan misal karyawan, produk yang dihasilkan perusahaan X sudah menjalankan dengan baik. Yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan X adalah terkait tata kelola dan manajemen pemakaian energy terutama energy alternative serta perhatian terhadap hayati lingkungan sekitar perusahaan.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada kondisi intern perusahaan terlebih dahulu. Untuk penelitian berikutnya, ada baiknya umpan balik dari masyarakat, pemerintah, juga stakeholder perusahaan X dilakukan. Fungsinya untuk mencari gap atas pelaksanaan CSR di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyudin, 2007, Republika: CSR, Strategy Membangun Budaya Humanis
- Basamalah, Anies S., and Johnny Jermias (2005), "Sosial and Environmental Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy?", *Gadjah Mada International Journal of Business*, January-April 2005, Vol. 7, No. 1, pp. 109 – 127.
- Campbell, J.P. In P.S. Goodman & J.M. Pennings (Eds.), 1977, On The Nature of Organizational Effectiveness, *New Perspectives on Organizational Effectiveness*: 13-55. San Fransisco: Jossey-Bass
- Freeman, 1984, Strategic Management, : Boston, USA.
- Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke (2005), "The Impact of Culture and Governance on Corporate Sosial Reporting", *Journal of Accounting and Public Policy* 24, pp. 391-430.
- Hannan, M.T. & Freeman, J., In P.S. Goodman & J.M. Pennings (Eds.), 1977, Obstacles to Comparative Studies, *New Perspectives on Organizational Effectiveness*: 106-131

Hendriksen Eldon, 1994, *Accounting Theory*, Third Edition, Mc. Hill, USA.

Quinn, R.E. & Cameron, K. 1983, *Organizational life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness : Some Preliminary Evidence*, *Management Science*, 29: 33-51

Roberts, R.W. (1992), "Determinants of Corporate social responsibility Disclosures: An Application of Stakeholder Theory", *Accounting, Organization and Society*, Vol. 17, No. 6: 595-612.

Sita Supomo, 2004, *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, www.fcgi.co.id . , *Corporate social responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG*.

Steers, R.M., 1975, *Problems In The Measurement Of Organizational Effectiveness* *Administrative Science Quarterly*, 20: 546-558

Yuchtman, E. & Seashore, S, 1967, *A System Resource Approach to Organizational Effectiveness*. *American Sociological Review*, 32: 891-903

Zammuto, R.F. 1984, *A Comparison of Multiple Constituency Models of Organizational Effectiveness* *Academy of Management Review*, 9:606-616

LAMPIRAN

Lampiran 1

INDIKATOR GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

INDIKATOR KINERJA EKONOMI

Aspek: Kinerja Ekonomi

EC1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.

Aspek: Kehadiran Pasar

EC5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
EC7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura,
-----	--

	atau pro bono.
EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN**Aspek: Material**

EN1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang

Aspek: Energi

EN3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer
EN4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer
EN5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi
EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

Aspek: Air

EN8	Total pengambilan air per sumber
EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

Aspek Biodiversitas**(Keanekaragaman Hayati)**

EN11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
EN13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat
EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah	
EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung

	dirinci berdasarkan berat
EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat
EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat
EN20	NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.

Aspek: Produk dan Jasa

EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana
------	--

	dampak pengurangan tersebut.
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Aspek: Kepatuhan

EN28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
------	---

Aspek: Pengangkutan/Transportasi

EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
------	--

Aspek: Menyeluruh

EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.
------	---

PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK**Aspek: Pekerjaan**

LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan

Manajemen

LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok
------	--

	karyawan.
LA11	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara

LA13	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karya-wan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
LA14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

HAK ASASI MANUSIA**Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan**

HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HR2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
HR3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal

	mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
--	--

Aspek: Nondiskriminasi

HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
-----	---

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul

HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-----	--

Aspek: Pekerja Anak

HR6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
-----	--

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib

HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
-----	--

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan

HR8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih
-----	--

	dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
--	--

Aspek: Hak Penduduk Asli

HR9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.
-----	--

MASYARAKAT/ SOSIAL**Aspek: Komunitas**

S01	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
-----	---

Aspek: Korupsi

S02	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
S03	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
S04	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

Aspek: Kebijakan Publik

S05	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
S06	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing

S07	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan,
-----	--

	anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
--	---

Aspek: Kepatuhan

S08	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
-----	---

TANGGUNG JAWAB PRODUK**Aspek: Kesehatan dan Keamanan****Pelanggan**

PR1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa

PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

Aspek: Komunikasi Pemasaran

PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan
-----	--

	komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
PR7	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan

PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-----	---

Aspek: Kepatuhan

PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa
-----	--